



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Kejari Telusuri Sisa Kerugian Negara Korupsi Perjalanan Dinas Setwan Kaur

BINTUHAN - Penasihat Hukum (PH) tiga tersangka kasus korupsi kegiatan perjalanan dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur tahun anggaran 2023 yakni mantan Sekwan AS, mantan Kabag Humas RO, dan AP mantan Kabag Umum kemarin, 3 Juni 2025 mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur. Mereka menemui Kasi Pid-sus Kejari Kaur, untuk menanyakan soal kelanjutan penanganan kasus korupsi perjalanan dinas Setwan Kaur.

Salah satunya adalah terkait dengan beberapa pihak yang belum melakukan pengembalian kerugian negara namun ikut serta menikmati aliran dana yang bersumber dari kegiatan perjalanan dinas Setwan Kaur.

PH ketiga tersangka Sopian Saidi Siregar SH, M.Kn mengatakan, keterangan yang dirinya dapatkan dari ketiga kliennya bahwa ada beberapa orang yang memang jelas ikut serta menikmati uang dari kegiatan perjalanan dinas Setwan Kaur sama seperti mereka.

Akan tetapi sampai dengan saat ini belum melakukan pengembalian.

Pihak-pihak yang belum melakukan pengembalian KN tersebut diantaranya adalah beberapa anggota DPRD Kaur, koordinator pelaksana kegiatan, dan juga para tenaga honorer. Sementara, tertera dalam proses penyidikan mereka bertanggungjawab mengembalikan KN sampai dengan ratusan juta rupiah.

"Yang menikmati harus mengembalikan KN, karena akan berdampak dengan hukuman ketika klien kami," kata Sopian.

Dirinya mengaku, setelah melakukan pertemuan pihak Kejari sendiri akan melakukan penagihan terhadap pihak-pihak yang menikmati uang yang bersumber dari kegiatan perjalanan dinas. Pihak Kejari saat ini juga masih melakukan audit, merunut satu persatu aliran dana kegiatan perjalanan dinas kemana saja uang tersebut masuk termasuk kepada ketiga tersangka.

"Hasil pertemuan, pihak Kejari tentu akan melakukan penagihan terhadap yang belum melakukan pengembalian KN dan saat ini tengah dilakukan audit menghitung KN masing-masing penikmat anggaran perjalanan dinas," ungkap Sopian.

Sopian mengingatkan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pengembalian KN, supaya segera melakukan pengembalian sebagaimana yang telah diminta oleh pihak Kejari Kaur. Musabab jika uang tersebut tidak dikembalikan, maka proses hukum dari pihak Kejaksaan tentu harus berjalan. Kemudian PH tersangka tentu akan meminta keadilan menyampaikan fakta ini nanti di saat persidangan kepada majelis hakim.

"Kalau nanti tidak dilakukan pengembalian, kami kuasa hukum akan melakukan langkah hukum. Salah satunya adalah dengan cara bersurat ke Kejaksaan meminta agar Kejari Kaur bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Kajari Kaur Pofrizal SH, MH, melalui Kasi Intelijen Albert SH, MH, menegaskan, pasca penetapan tersangka pihaknya memang belum bisa menyampaikan banyak soal tahapan berikutnya. Saat ini tim penyidik masih terus melakukan pelengkapan berkas keempat tersangka untuk nanti dilakukan persidangan, kemudian juga terus dilakukan pendalaman terkait dengan KN sebesar Rp 5,5 miliar yang belum berhasil di pulihkan.

"Sekarang masih proses penyidikan, kalau semua berkas sudah rampung kabar terbaru soal penanganan kasus ini akan kita sampaikan jadi dimohon sabar dulu," tegasnya

Tim penyidik saat ini masih terus melakukan pengumpulan data dan fakta, yang nantinya akan disampaikan pada saat proses persidangan. Jika memang ada keterlibatan pihak lain, maka nanti akan menjadi fakta yuridis dan akan menyeret pihak-pihak lain yang ikut serta menikmati anggaran perjalanan dinas Setwan Kaur tahun anggaran 2023.

"Fakta-fakta nanti akan disampaikan saat persidangan, seperti aliran dana korupsi dan fakta lain yang menyangkut beberapa pihak," ujarnya.

Sementara itu, dalam upaya melakukan pemulihan kerugian negara Kejari Kaur saat ini telah membekukan aset bergerak dan tidak bergerak milik keempat tersangka.

Bahkan aset keempat tersangka itu, terancam akan disita jika pembeliannya terbukti menggunakan uang hasil korupsi dari anggaran perjalanan dinas Setwan Kaur.

Tak hanya aset atas nama mereka, aset atas nama orang terdekat tersangka sekarang juga di bekukan oleh tim penyidik untuk dilakukan pendataan terlebih dahulu.

"Soal aset keempat tersangka, semua sudah di data dan dibekukan yang terbukti dibeli menggunakan dana korupsi akan kita sita," sampai Albert.

Sebagai informasi, Selasa 20 Mei 2025 Kejari Kaur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran perjalanan dinas Setwan Kaur. Empat orang tersebut diantaranya adalah mantan Sekwan AS, mantan Kabag Humas RO, AP mantan Kabag Umum, dan HL sebagai Kasubag di Setwan Kaur.

Pada kegiatan perjalanan dinas di tahun 2023 total anggarannya sebesar Rp 21 miliar. Yang mana setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) timbul Kerugian negara, sehingga dilakukannya pendalaman oleh tim penyidik Kejari Kaur dan terbukti selama proses penyelidikan dan penyidikan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pemegang anggaran perjalanan dinas.

Setelah dilakukan penyidikan kurang lebih tiga bulan lamanya, ditemukan berbagai fakta mulai dari pencatatan nama-nama tenaga honorer dan juga nama ASN di ruang lingkup Setwan Kaur untuk melaksanakan perjalanan dinas fiktif, penggunaan invoice fiktif, serta kerjasama dengan pihak ketiga untuk meraup keuntungan perjalanan dinas fiktif dengan sistem cashback. (cil)